



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dengan sebutan lain Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat

OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Blitar.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang secara substantif RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Walikota Blitar terpilih setelah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pokok-pokok program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi (RPJMP).
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA – SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

- (1) Renja – PD Tahun 2023 merupakan dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

- (2) Renja – PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA – SKPD.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renja – PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Hasil Evaluasi Renja – PD Tahun Lalu
BAB III	: Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
BAB IV	: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V	: Penutup

- (2) Rincian Renja – PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Renja – PD Tahun 2023 terdiri dari Perangkat Daerah :

- a. Sekretariat DPRD Kota Blitar;
- b. Sekretariat Daerah Kota Blitar;
- c. Inspektorat Daerah Kota Blitar;
- d. Dinas Pendidikan Kota Blitar;
- e. Dinas Kesehatan Kota Blitar;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar;
- g. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar;
- h. Dinas Sosial Kota Blitar;
- i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Blitar;

- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;
- m. Dinas Perhubungan Kota Blitar;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar;
- p. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar;
- r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar;
- s. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar;
- t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar;
- u. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar;
- v. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar;
- w. Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kota Blitar;
- x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar;
- y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar;
- z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar;
- aa. Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar;
- bb. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- cc. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar; dan
- dd. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dalam hal program dan kegiatan Renja – PD Tahun 2023 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini berbeda dengan hasil pembahasan bersama

DPRD, maka yang dipergunakan adalah program dan kegiatan hasil pembahasan bersama dengan DPRD.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 4 Agustus 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

6. RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR TAHUN 2023

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan itu sendiri terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, di mana dalam Pasal 126 ayat 2 dijelaskan bahwa Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Berdasarkan pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah itu pula, dijabarkan antara lain:

1. Pengertian Renja Perangkat Daerah berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yakni Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

2. Pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan:
 - a. Persiapan penyusunan;
 - b. Penyusunan rancangan awal;
 - c. Penyusunan rancangan;
 - d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - e. Perumusan rancangan akhir; dan
 - f. Penetapan.
3. Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Setelah disusun berdasarkan tahapan dan tata cara, maka rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar 2023 disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun 2022 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar;
3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024;
4. Penyusunan Renja PD bukanlah merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan

dengan penyusunan RKPD 2023, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, penyusunan Renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu, Pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya, antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi di mana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu, penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2023 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2023.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri Nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya, harus terdapat kesesuaian antara dokumen Renstra dengan dokumen Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu, penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun 2023 juga berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021-2026.

1.1.3 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Provinsi.

Renja Kementerian/Lembaga (Renja Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan Renja Provinsi (Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur,

Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun, Renja Kementrian dan Renja Provinsi perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program Provinsi dan Pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun 2023.

1.1.4 Renja dan Tindak Lanjutnya dalam APBD.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Kota Blitar tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2023. Sedangkan RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2023 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu, Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun 2023 berdasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
 21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2023.
26. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk menyinergikan program regional dan sektoral, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Serta menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahun 2023 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2023.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

- Merumuskan program dan kegiatan yang terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah;
- Menyajikan capaian kinerja pelayanan tahun lalu sebagai dasar penyusunan rencana Tahun 2023;
- Menyajikan isu strategi, tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai fokus pelayanan yang akan diwujudkan dan dikedepankan;

- Memberikan arahan rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD; dan
- Sebagai pedoman penyusunan KUA-PPAS Tahun 2023 dan RAPBD Kota Blitar Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2022 sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika.
- BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun Lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, *review* terhadap rancangan awal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, dan penelaahan usulan program masyarakat.
- BAB III Tujuan dan Sasaran, menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan
- BAB IV Penataan Ruang Kota Blitar yang disertai dengan prakiraan maju Tahun 2024.
- BAB V Penutup, menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun 2023.

BAB II
EVALUASI HASIL RENJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

Tercapai-tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *value for money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

- Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
- Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan, agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
- Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021 telah berakhir. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 telah

dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dalam pelaksanaan Renja 2021 terdapat 3 Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi, antara lain:

Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih	100,00	98,35	98,35
Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Domestik	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah	100,00	96,42	96,42
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	97,00	96,10	99,07

2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dalam pelaksanaan Renja 2021, program/kegiatan yang memenuhi dan melebihi target kinerja hasil/keluaran adalah sebagai berikut:

Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50	82,50	100
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	96,00	96,10	100,10
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan pemerintah yang sesuai dengan standar	75,00	88,27	117,69
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan	76,00	81,55	107,30
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar	59,45	59,45	100
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	94,57	98,42	104,07
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100	100	100
Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah	96,00	96,00	100

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja.

- a. Kurangnya koordinasi yang baik antara perangkat daerah dengan pihak-pihak terkait
 - b. Kualitas dan komitmen SDM masih kurang, baik dalam bidang penguasaan informasi teknologi dan kesadaran yang membudaya untuk melaksanakan tugas dalam sebuah organisasi.
 - c. Sulitnya menentukan skala prioritas kegiatan di lapangan, karena adanya kondisi emergensi di lapangan.
 - d. Belum tersusunnya sistem manajemen data yang akurat dan terkoneksi.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi atau melebihi target sesuai Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdampak positif bagi kelancaran pelaksanaan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar serta realisasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya.
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdampak pada laporan kinerja dan realisasi keuangan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, antara lain:
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik dari semua aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menangani kegiatan.
 - b. Perlu adanya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

Berikut disampaikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 untuk mendapatkan gambaran sebagaimana disebutkan di atas:

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD
dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2022 Kota Blitar

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022			
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Ting kat Real isasi (%)			Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4			5	6	7	8	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
			Vol	Satua n	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,60	Nilai	6.027.258.798					BAIK (82,60%)	5.945.124.997	41,18%	2.447.980.914	41,18%	2.447.980.914
	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	%	37.057.500					100	47.019.600	5,39%	2.535.000	5,39%	2.535.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	10	doku men	6.559.000					11	6.559.000				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	13	doku men	30.498.500					13	40.460.600				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keuaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022				
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	%	4.714.767.673					100	4.467.921.772	43,97%	1.964.662.015	43,97%	1.964.662.015
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	36	orang	4.710.309.873					36	4.463.463.972				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	5	dokumen	4.457.800					5	4.457.800				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%	85.571.200					100	85.571.200	1,52%	1.300.000	1,52%	1.300.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti	5	event	85.571.200					5	85.571.200				
		Jumlah publikasi program /kegiatan perangkat daerah	1	publikasi		1						1			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	%	556.377.125					100	711.127.125	47,37%	336.858.581	47,37%	336.858.581

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keuaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022			
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	16	macam	13.290.100				16	13.290.100				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	6	macam	92.702.200				2	92.702.200				
		Jumlah peralatan kantor yang terpenuhi	2	macam					6					
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	9	macam	3.633.325				9	3.633.325				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	400	dos	75.373.000				400	280.123.000				
		Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	66	macam					66					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	7	macam	14.568.400				7	14.568.400				
		Jumlah lembar penggandaan	8500	lembar					8.500					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2	macam	6.780.000				2	6.780.000				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan	80	kali	350.030.100				80	300.030.100				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keuaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022			
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4			5	6	7	8	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	dan Konsultasi SKPD	konsultansi regional dan nasional yang diikuti													
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	%	103.353.000					100	103.353.000	35,55%	36.737.668	35,55%	36.737.668
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan (termasuk listrik, air, telepon, internet)	4	rekening	103.353.000					4	103.353.000				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%	530.132.300					100	530.132.300	19,97%	105.887.650	19,97%	105.887.650
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	20	unit	202.775.000					8	202.775.000				
		Jumlah kendaraan dinas /operasional terpelihara	8	unit						20					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, scanner, kamera, fax)	5	macam	11.713.200					1	280.120.000				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keuaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022				
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1	unit	280.120.000					5	11.713.200				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair)	4	macam	35.524.100					4	35.524.100				
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	96,00	%	10.826.688.339					96	10.717.818.097	17,07%	1.829.069.000	17,07%	1.829.069.000
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase talud yang dibangun	20	%	3.949.240.654					20,00	3.949.240.654	18,90%	746.589.100	18,90%	746.589.100
	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang talud yang dibangun	75	m	623.457.084					75	623.457.084				
	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang talud yang direhabilitasi	310	m	3.325.783.570					310	3.225.783.570				
		Jumlah dokumen yang tersusun	1	dokumen						1	100.000.000				
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1	Persentase jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan	6,56	%	6.877.447.685					6,56	6.768.577.443	15,99%	1.082.479.900	15,99%	1.082.479.900

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keuaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022			
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi yang dibangun	0	%					6,56					
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	1.075	m	1.774.169.991				1.075	5.094.938.333				
		Jumlah dokumen yang tersusun	1	dokumen					1					
		Jumlah alat survey yang tersedia	3	unit					3					
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (DAK)	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	2.530	m	3.429.638.584				-	-				
		Jumlah dokumen yang tersusun	1	dokumen					-					
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan pengairan/irigasi yang dipelihara	2.116	m	1.673.639.110				2.116	1.673.639.110				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	98	%	2.968.788.068				98	3.418.788.067	0,00%	-	0,00%	-
	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara	1,06	%	2.968.788.068				1,06	3.418.788.067	0,00%	-	0,00%	-
		Persentase saluran drainase yang dibangun	33,5	%										
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase yang dibangun	1.793	m	2.668.788.068				1793	3.118.788.067				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keuaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022				
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)		
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase yang dipelihara	400	m	300.000.000					400	300.000.000				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase SPAM dalam kondisi baik	88,80	%	1.029.807.000					88,8	109.890.000	4,46%	4.905.000	4,46%	4.905.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPAM yang terbangun	57,89	%	1.029.807.000					57,89	109.890.000	4,46%	4.905.000	4,46%	4.905.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah peserta sosialisasi air minum perkotaan	100	orang	109.890.000					100	109.890.000				
		Jumlah dokumen yang tersusun	1	dokumen						1					
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM yang dibangun (DAK)	3	unit	919.917.000					0					
		Jumlah SR SPAM yang dibangun (DAK)	80	SR											
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase SPALD dalam kondisi baik	82	%	1.204.155.500					82	1.593.115.500	0,93%	14.790.000	0,93%	14.790.000
	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam	Persentase SPALD yang terbangun	57,89	%	1.204.155.500					57,89	1.593.115.500	0,93%	14.790.000	0,93%	14.790.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keuaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022				
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)		
	daerah Kabupaten/Kota														
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupeten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi sanitasi perkotaan	150	orang	117.335.500					150	117.335.500				
		Jumlah dokumen yang tersusun	1	dokumen						1					
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman (DAK)	Jumlah sambungan rumah yang dibangun/dipeelihara	30	SR	123.000.000					30	149.000.000				
		Jumlah prasarana IPAL yang dibangun/dipeelihara													
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman (DAK)	Jumlah prasarana IPAL yang dibangun	2	unit	585.820.000					2	502.780.000				
		Jumlah SR IPAL yang dibangun	60	SR						60					
	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT (DAK)	Jumlah tangki septik yang dibangun	6	unit	378.000.000					6	824.000.000				
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintahan yang dibangun	83,33	%	7.004.439.588					83,33	9.028.438.277	23,60%	2.130.390.013	23,60%	2.130.390.013
		Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun	82,61	%						82,61					
	Pengelolaan bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten/Kota, pemberian izin	Jumlah jenis penyelenggaraan bangunan gedung	2	jenis	7.004.439.588					2	9.028.438.277	23,60%	2.130.390.013	23,60%	2.130.390.013

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keuaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022				
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)		
	mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung														
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Setifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah surat ketetapan retribusi yang diterbitkan	300	SKR	149.999.036					300	149.999.036				
		Jumlah sistem informasi yang terupdate	1	sistem						1					
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang dibangun dan direhabilitasi	2	unit	6.791.767.47 2					2	8.815.766.161				
		Jumlah fasilitas umum yang dibangun dan direhabilitasi	1	unit						1					
		Jumlah dokumen yang tersusun	1	dokumen						1					
	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang tersusun	1	dokumen	62.673.080					1	62.673.080				
		Jumlah peserta sosialisasi	100	orang						100					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi baik	99,2	%	8.136.773.06 2					99,2	8.647.874.655	10,69%	924.473.249	10,69%	924.473.249
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	99,6	%						99,6					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keuaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022				
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)		
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi	3,20	%	8.136.773.06 2				3,20	8.647.874.655	10,69%	924.473.249	10,69%	924.473.249
		Persentase jembatan yang dipelihara	4,08	%					4,08					
		Persentase jalan yang dibangun	100	%					100					
		Persentase jembatan yang dibangun		%										
	Rehabilitasi jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi		m	3.869.329.78 8					5.536.760.733				
		Panjang utilitas jalan yang direhabilitasi	1982	m					1.982					
		Panjang jalan yang dibangun	125	m					125					
		Jumlah dokumen yang tersusun		dokumen										
	Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK)	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan berkala	2100	m	3.118.620.35 2				2100	1.462.291.000				
		Jumlah dokumen yang tersusun	2	dokumen					2					
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin	1000	m	1.048.822.92 2				1000	1.548.822.922				
		Panjang utilitas jalan yang dipelihara	403	m					403					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022				
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Jumlah alat berat yang dipelihara	4	unit					4					
		Jumlah alat berat yang tersedia	2	unit					2					
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	3	unit	100.000.000				3	100.000.000				
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar	100	%	322.872.200				100	322.872.200	9,71%	31.348.600	9,71%	31.348.600
	Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	68,25	%	240.757.200				68,25	240.757.200	13,02%	31.348.600	13,02%	31.348.600
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta sertifikasi tenaga terampil konstruksi	100	orang	83.905.700				100	83.905.700				
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi peraturan jasa konstruksi (3 kali kegiatan, 100 peserta, 50 peserta dan 50 peserta)	250	orang	156.851.500				250	156.851.500				
		Jumlah norma, standar, prosedur dan/atau kriteria jasa	12	dokumen					12					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keuaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022				
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)		
		konstruksi yang tersusun													
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI	20	%	82.115.000					20	82.115.000	0,00%	-	0,00%	-
	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah konsultasi/pendampingan teknis layanan jasa konstruksi	10	kali	11.250.000					10	11.250.000				
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah aplikasi yang dijalankan	1	aplikasi	37.290.000					1	37.290.000				
	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah data dan informasi pekerjaan konstruksi	1	dokumen	33.575.000					1	33.575.000				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	76,32	%	912.687.140					76,32	1.262.687.140	5,29%	66.844.460	5,29%	66.844.460
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun	2	dokumen	559.113.180					2	559.113.180	3,64%	20.358.000	3,64%	20.358.000
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah RTRW yang tersusun	0	dokumen	559.113.180					0	559.113.180				
		Jumlah RRTR yang tersusun	2	dokumen						2					
		Jumlah peserta sosialisasi	100	orang						100					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	Persentase ketersediaan sistem	100	%	50.000.000					76,32	50.000.000	0,00%	-	0,00%	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keuaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022				
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Ting kat Reali sasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)		
	Daerah Kabupaten/Kota	informasi tata ruang												
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate	1	sistem	50.000.000				1	50.000.000				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketidaksesuaia n tata ruang yang ditindaklanjuti	4,78	%	303.573.960				4,78	653.573.960	7,11%	46.486.460	7,11%	46.486.460
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah fasilitasi dan koordinasi evaluasi tata ruang	1	fasilita si	303.573.960				1	653.573.960				
		Jumlah dokumen yang disusun	3	doku men					3					
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti	100	%	25.000.000				100	25.000.000	0,00%	-	0,00%	-
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti sesuai regulasi	1	sengk eta	25.000.000				1	25.000.000	0,00%	-	0,00%	-
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1	Jumlah masalah pertanahan yang ditindaklanjuti	1	masal ah	25.000.000				1	25.000.000				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022				
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)		
	(satu) Daerah Kabupaten/Kota														
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah aset Pemerintah Kota bersertifikat	96	%	374.446.000					96	374.446.000	3,71%	13.880.800	3,71%	13.880.800
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pertanahan yang tersusun	2	dokumen	374.446.000					2	374.446.000	3,71%	13.880.800	3,71%	13.880.800
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah fasilitasi jasa appraisal tanah	1	fasilitasi	179.450.000					1	179.450.000				
		Jumlah sertifikat yang diterbitkan	10	sertifikat								10			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen identifikasi dan inventarisasi pertanahan	1	dokumen	194.996.000					1	194.996.000				
		Jumlah koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah	1	koordinasi								1			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor-faktor dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong :

- a. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar yang telah sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Mekanisme kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar yang berorientasi kepada pencapaian kinerja dari pada pembangunan sektoral.
- c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
- d. Adanya dukungan OPD terhadap upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.
- e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

2. Faktor Penghambat :

- a. Belum memadainya jumlah tenaga yang menguasai perencanaan dan penelitian serta pengkajian.
- b. Belum tersedianya data-data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- c. Belum memadainya kemampuan untuk menyusun suatu kerangka pembangunan strategis yang benar-benar mencerminkan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat.
- d. Belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengkajian sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan.
- e. Masih terdapatnya kebijakan pembangunan daerah yang seringkali tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2020 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

No.	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PD			REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan			75,50%	76%	76,20%	76,00%	76,20%	
2	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik			95%	96%	97%	96,00%	97%	
3	Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart			70%	75%	94,60%	75,00%	94,60%	
4	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih	100% pada Tahun 2019		100%	100%	2,45	100,00%	2,45	
5	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah	100% pada Tahun 2019		100%	100%	9,07	100,00%	9,07	
6	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik			96%	97%	98%	97,00%	98%	
7	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang			93,96%	94,57%	40,55%	94,57%	40,55%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan urusannya permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Degradasi kualitas layanan jalan.
2. Pemanfaatan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya.
3. Rasio kecukupan penyediaan air minum layak bagi masyarakat.
4. Rasio kecukupan penyediaan sarana air limbah bagi masyarakat.
5. Adanya penyimpangan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Tata Ruang.

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan di wilayah Kota Blitar, juga berasal dari analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal dapat diambil dari berbagai informasi dari dunia internasional, kebijakan nasional (RPJMN), regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur), dan lain-lain yang berdampak langsung pada pembangunan Kota Blitar selama lima tahun ke depan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain:

1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang dan berkelanjutan.
2. Penguatan sistem jaringan drainase dan jalan di Kota Blitar.
3. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang secara terintegrasi

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah menentukan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Pemulihan ekonomi melalui perdagangan dan jasa, pariwisata, serta ekonomi kreatif berbasis digital;
3. Peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan;
4. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berorientasi masyarakat, dan berbasis teknologi informasi;
5. Peningkatan nilai-nilai religius, nasionalis, setara gender, berbudaya, kondusif, dan demokratis;

6. Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup untuk mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar, dan ketahanan bencana.

Dari 6 (enam) prioritas pembangunan dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar ditunjuk sebagai salah satu penanggung jawab atau pelaksana pada prioritas ke-6 dengan sasaran:

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum;
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman; dan
3. Meningkatnya kualitas penataan ruang.

Jika mengacu pada dukungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar untuk RPJMD pada tahun 2022, prioritas kinerja yang dilakukan di dalam kerangka capaian arah kebijakan Pemenuhan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemulihan Ekonomi antara lain:

1. Peningkatan kompetensi SDM pelaku jasa konstruksi melalui pelatihan dan pembinaan;
2. Penyediaan/peningkatan infrastruktur transportasi/jalan akses antar-wilayah dan pusat ekonomi;
3. Peran langsung masyarakat dalam pembangunan infrastruktur melalui kegiatan swakelola (padat karya); dan
4. Pendampingan dan konsultasi perencanaan konstruksi.

Sementara prioritas tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pelaksanaan perubahan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar: pengelolaan limbah domestik, pengembangan permukiman kawasan strategis, dan pengelolaan drainase lingkungan; dan
2. Dukungan capaian arah kebijakan tahun 2023 RPJMD Kota Blitar 2021-2026, yaitu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dan Normalisasi Ekonomi Daerah melalui pengembangan layanan berbasis IT yang terintegrasi, peningkatan kompetensi pejabat fungsional dan pelaku jasa konstruksi, peningkatan kualitas infrastruktur, dan pengendalian tata ruang.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel di bawah:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.00
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40,303,271,100.00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				46,908,188,434.00
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				40,303,271,100.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				46,908,188,434.00
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,402,500,000.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7,595,700,314.00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				42,500,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				27,076,148.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun pada tahun bersangkutan	10 dokumen	7,500,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun pada tahun bersangkutan	10 dokumen	2,076,148.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun pada tahun bersangkutan	1 laporan	35,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun pada tahun bersangkutan	1 laporan	25,000,000.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,806,000,000.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,929,871,652.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan pada tahun bersangkutan	36 orang/bulan	4,800,000,000.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan pada tahun bersangkutan	36 orang/bulan	5,927,703,792.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun pada tahun bersangkutan	5 dokumen	6,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun pada tahun bersangkutan	5 laporan	2,167,860.00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				90,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				133,828,250.00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapannya	3 paket	39,000,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapannya	3 paket	94,208,250.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah orang mengikuti sosialisasi perundang-undangan	80 orang	51,000,000.00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah orang mengikuti sosialisasi perundang-undangan	60 orang	39,620,000.00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				604,000,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah				678,343,664.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	15,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	20,574,080.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 paket	65,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 paket	264,755,308.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	45,000,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	2,966,868.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	80,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	40,965,000.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	16,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	41,977,408.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 dokumen	8,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 dokumen	6,600,000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Sananwet an,	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	80 laporan	375,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Sananwet an,	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	80 laporan	291,130,000.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.00
		Sananwet an					Sananwet an			
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	0 dokumen	0.00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	100 dokumen	9,375,000.00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				162,665,600.00
	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah unit paket mebel yang disediakan	0 unit	0.00	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah unit paket mebel yang disediakan	32 unit	125,110,400.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 unit	0.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit	37,555,200.00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				110,000,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				294,003,000.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	110,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	61,953,000.00
	Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	0 laporan	0.00	Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	104 laporan	232,050,000.00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				750,000,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				369,912,000.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	28 unit	210,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	28 unit	191,881,400.00
	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar, Sananwet an,	Jumlah mebel yang dipelihara	0 unit	0.00	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar, Sananwet an,	Jumlah mebel yang dipelihara	39 unit	18,200,000.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.00
		Sananwet an					Sananwet an			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	15,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Sananwet an, Sananwet an	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	43,760,400.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	200,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	80,590,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	325,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	35,480,200.00
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				11,650,000,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				10,579,726,984.00
8	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				4,150,000,000.00	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0.00
	Pembangunan Tanggul Sungai	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang talud yang dibangun	0,075 km	650,000,000.00	Pembangunan Tanggul Sungai	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang talud yang dibangun	0 km	0.00
	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang talud yang direhabilitasi	0,310 km	3,500,000,000.00	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang talud yang direhabilitasi	0 km	0.00
9	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				7,500,000,000.00	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				10,579,726,984.00
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen rencana teknis konstruksi irigasi yang tersusun	0 dokumen	0.00	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen rencana teknis konstruksi irigasi yang tersusun	3 dokumen	300,000,000.00
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Blitar,	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	0 km	0.00	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Blitar,	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	0,346 km	2,282,400,000.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.00
		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	1,075 km	2,000,000,000.00	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	1.743 km	1,802,777,320.00
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	2,530 km	3,500,000,000.00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	2.500 km	3,161,924,800.00
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	2,530 km	2,000,000,000.00	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	3.054 km	3,032,624,864.00
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				1,081,297,350.00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				307,528,900.00
10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota				1,081,297,350.00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota				307,528,900.00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM yang disusun	1 dokumen	115,384,500.00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM yang disusun	1 dokumen	119,378,900.00
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM tematik tertentu yang dibangun	15 liter/detik	965,912,850.00	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM tematik tertentu yang dibangun	0 liter/detik	0.00
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM tematik tertentu yang ditingkatkan	0 liter/detik	0.00	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM tematik tertentu yang ditingkatkan	15 liter/detik	88,150,000.00
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM tematik tertentu yang dipelihara	0 unit	0.00	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM tematik tertentu yang dipelihara	2 unit	100,000,000.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.00		
		n, Semua Kelurahan					n, Semua Kelurahan					
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1,264,363,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					2,267,604,118.00
11	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					1,264,363,000.00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					2,267,604,118.00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, n, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPALD yang tersusun	1 dokumen	123,202,000.00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, n, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPALD yang tersusun	1 dokumen	416,855,747.00		
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Kota Blitar, Semua Kecamatan, n, Semua Kelurahan	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui sambungan SPALD-T skala permukiman	10 rumah tangga	129,150,000.00	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Kota Blitar, Semua Kecamatan, n, Semua Kelurahan	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui sambungan SPALD-T skala permukiman	10 rumah tangga	149,000,000.00		
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, n, Semua Kelurahan	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	0 rumah tangga	0.00	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, n, Semua Kelurahan	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	25 rumah tangga	824,000,000.00		
	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, n, Semua Kelurahan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	0 kelompok	0.00	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, n, Semua Kelurahan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	10 kelompok	72,022,859.00		
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, n, Semua Kelurahan	Jumlah unit sistem pengelolaan air limbah domestik yang dioperasikan dan dipelihara	0 unit	0.00	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, n, Semua Kelurahan	Jumlah unit sistem pengelolaan air limbah domestik yang dioperasikan dan dipelihara	2 unit	100,000,000.00		
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kota Blitar, Semua Kecamatan, n, Semua Kelurahan	Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	60 rumah tangga	615,111,000.00	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kota Blitar, Semua Kecamatan, n, Semua Kelurahan	Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	50 rumah tangga	502,780,000.00		
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kota Blitar, Semua Kecamatan	Jumlah rumah tangga yang terlayani penyedotan lumpur tinja	0 rumah tangga	0.00	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kota Blitar, Semua Kecamatan	Jumlah rumah tangga yang terlayani penyedotan lumpur tinja	36 rumah tangga	25,335,200.00		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.00
		n, Semua Kelurahan					n, Semua Kelurahan			
	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kapasitas IPLT yang dibangun	6 rumah tangga	396,900,000.00	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kapasitas IPLT yang dibangun	0 rumah tangga	0.00
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kapasitas IPLT yang direhabilitasi/ditingkatkan	0 m ² /hari	0.00	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kapasitas IPLT yang direhabilitasi/ditingkatkan	20 m ² /hari	177,610,312.00
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				3,161,095,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				8,631,822,300.00
12	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				3,161,095,000.00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				8,631,822,300.00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen yang tersusun	0 dokumen	0.00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	177,873,820.00
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	1.793 m	2,846,095,000.00	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	1.500 m	6,440,371,460.00
	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dilakukan rehabilitasi	0 m	0.00	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dilakukan rehabilitasi	250 m	1,516,716,800.00
	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana sistem drainase perkotaan yang disediakan	0 unit	0.00	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana sistem drainase perkotaan yang disediakan	1 unit	108,860,220.00
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang saluran drainase yang dioperasikan dan dipelihara	400 meter	315,000,000.00	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang saluran drainase yang dioperasikan dan dipelihara	400 m	388,000,000.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.00		
VI	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					6,270,000,000.00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					5,872,126,318.00
13	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					6,270,000,000.00	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					5,872,126,318.00
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen yang tersusun	5 dokumen	180,000,000.00	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen yang tersusun	5 dokumen	255,813,868.00		
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen	6,000,000,000.00	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen	5,616,312,450.00		
	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	90,000,000.00	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen yang tersusun	0 dokumen	0.00		
	Bantuan Teknis Pembangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen yang tersusun	0 dokumen	0.00	Bantuan Teknis Pembangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen yang tersusun	0 dokumen	0.00		
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					9,115,000,000.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					9,440,857,989.00
14	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					9,115,000,000.00	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					9,440,857,989.00
	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen yang tersusun	0 dokumen	0.00	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen yang tersusun	3 dokumen	400,000,000.00		
	Pembangunan Jalan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jalan yang dibangun	0 km	0.00	Pembangunan Jalan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jalan yang dibangun	0 km	0.00		
	Rehabilitasi Jalan	Kota Blitar,	Panjang jalan yang direhabilitasi	1,982 km	4,000,000,000.00	Rehabilitasi Jalan	Kota Blitar,	Panjang jalan yang direhabilitasi	1 km	5,286,421,316.00		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.00		
		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	2,1 km	3,500,000,000.00	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	2 km	1,441,616,674.00		
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	1 km	1,500,000,000.00	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	1 km	750,000,000.00		
	Pembangunan Jembatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jembatan yang dibangun	0 m	0.00	Pembangunan Jembatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jembatan yang dibangun	20 m	443,880,000.00		
	Pelebaran Jembatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jembatan yang dilakukan pelebaran	4 m	0.00	Pelebaran Jembatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jembatan yang dilakukan pelebaran	4 m	389,999,999.00		
	Rehabilitasi Jembatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0 m	0.00	Rehabilitasi Jembatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jembatan yang direhabilitasi	3 m	628,940,000.00		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jembatan yang dipelihara secara rutin	400 m	115,000,000.00	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jembatan yang dipelihara secara rutin	400 m	100,000,000.00		
VII I	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					339,015,750.00	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					731,908,929.00
15	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					252,795,000.00	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				387,216,184.00	
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi	100 orang	88,101,000.00	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi	100 orang	135,767,165.00		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.00
		n, Semua Kelurahan	atau analisis yang tersertifikasi				n, Semua Kelurahan	atau analisis yang tersertifikasi		
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	250 orang	164,694,000.00	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	250 orang	251,449,019.00
16	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				86,220,750.00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				194,692,745.00
	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah konsultasi/pendampingan teknis layanan jasa konstruksi	10 konsultasi	11,812,500.00	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan dukungan manajemen sistem informasi jasa konstruksi	1 laporan	7,453,145.00
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen data dan informasi yang dihasilkan dari perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi yang tersusun	2 dokumen	39,154,500.00	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen data dan informasi yang dihasilkan dari perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi yang tersusun	2 dokumen	67,950,000.00
	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah data dan informasi pekerjaan konstruksi	3 dokumen	35,253,750.00	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah data dan informasi pekerjaan konstruksi	3 dokumen	73,129,600.00
	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang tersusun	0 dokumen	0.00	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang tersusun	4 dokumen	46,160,000.00
17	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				0.00	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				150,000,000.00
	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SOP/pedoman tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi yang tersusun	0 dokumen	0.00	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SOP/pedoman tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi yang tersusun	2 dokumen	150,000,000.00
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib	Semua Kab/Kota, Semua	Jumlah laporan dokumen pengawasan dan	0 laporan	0.00	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib	Semua Kab/Kota, Semua	Jumlah laporan dokumen pengawasan dan	0 laporan	0.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.00
	Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kecamatan, Semua Kelurahan	evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi yang tersusun			Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kecamatan, Semua Kelurahan	evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi yang tersusun		
IX	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1,020,000,000.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1,480,912,582.00
18	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				650,000,000.00	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				129,467,846.00
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen RTRW yang tersusun	0 dokumen	0.00	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen RTRW yang tersusun	0 dokumen	0.00
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen RRTR yang tersusun	2 dokumen	650,000,000.00	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen RRTR yang tersusun	2 dokumen	129,467,846.00
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen sosialisasi yang tersusun	0 dokumen	0.00	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen sosialisasi yang tersusun	0 dokumen	0.00
19	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				0.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				775,000,000.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen materi teknis RTRW dan RRTR yang tersusun	0 dokumen	0.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen materi teknis RTRW dan RRTR yang tersusun	2 dokumen	775,000,000.00
20	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				60,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				226,146,623.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan rekomendasi persetujuan pemanfaatan ruang	0 dokumen	0.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan rekomendasi persetujuan pemanfaatan ruang	12 dokumen	151,146,623.00
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Kota Blitar, Semua Kecamatan	Jumlah dokumen data dan informasi yang tersusun	1 dokumen	60,000,000.00	Sistem Informasi Penataan Ruang	Kota Blitar, Semua Kecamatan	Jumlah dokumen data dan informasi yang tersusun	1 dokumen	75,000,000.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.00
		n, Semua Kelurahan					n, Semua Kelurahan			
21	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				310,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				350,298,113.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan tindak lanjut pengendalian pemanfaatan ruang yang tersusun	0 dokumen	0.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan tindak lanjut pengendalian pemanfaatan ruang yang tersusun	0 dokumen	0.00
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen pelaksanaan penataan ruang yang tersusun	3 dokumen	310,000,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen pelaksanaan penataan ruang yang tersusun	5 dokumen	350,298,113.00
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				473,000,000.00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				344,899,400.00
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				473,000,000.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				344,899,400.00
X	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				28,000,000.00	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				15,750,000.00
22	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				28,000,000.00	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				15,750,000.00
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah berita acara penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan yang ditindaklanjuti	1 berita acara	28,000,000.00	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah berita acara penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan yang ditindaklanjuti	1 berita acara	15,750,000.00
XI	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				445,000,000.00	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				329,149,400.00
23	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				445,000,000.00	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				329,149,400.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan yang tersusun	1 laporan	195,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan yang tersusun	1 laporan	100,000,000.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	250,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	229,149,400.00
JUMLAH					40,776,271,100.00					47,253,087,834.00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari pelaksanaan musrenbang maupun hasil Pokok-pokok Pikiran DPRD. Rumusan usulan program dan kegiatan dimaksud dijabarkan dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel. 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan	
I	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
1	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Talud/Plengsengan Makam Swangsan, Kel Bendogerit	Panjang talud yang dibangun	p: 90 m, l/t: 4,5 m	Musrenbang	
		Talud Sungai Sumber Bentis, RT 1/RW 5 Kel Karang Sari			Pokok Pikiran DPRD	
		Lanjutan Talud Makam Pakunden, Kel Pakunden			Pokok Pikiran DPRD	
		Talud Jalan Salak, Kel Karang Sari			Pokok Pikiran DPRD	
		Talud IPAL Komunal, RT 4 RW 3 Kel Blitar			Pokok Pikiran DPRD	
		Talud Jalan Simpang Sumatera			Pokok Pikiran DPRD	
		Lanjutan Talud RT 1 RW Kel Kauman			Pokok Pikiran DPRD	
		Talud/Plengsengan Jl DI Panjaitan, Kel Ngadirejo			Pokok Pikiran DPRD	
		Talud Jalan Sungai Hulu Barat, RT 1 RW 9 Kel Kauman			Pokok Pikiran DPRD	
		Talud Penahan Jalan Masalembu Barat, Kel Klampok			Pokok Pikiran DPRD	
		Talud Jalan Pierre Tendean, Kel Gedog			Pokok Pikiran DPRD	
	Tanggul Sungai Jl Pemuda Sumpomo, Kel Gedog	Pokok Pikiran DPRD				
II	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Drainase RT 2 RW 14 Kel Sukorejo	Panjang saluran drainase yang dibangun	200 m	Musrenbang	
		Saluran Tertutup RT 4 RW 7 Kel Pakunden			Pokok Pikiran DPRD	
		Saluran Tertutup RT 4 RW 14 Kel Sukorejo			Pokok Pikiran DPRD	
		Saluran Tertutup RT 2 RW 4 Kel Tanjungsari			Pokok Pikiran DPRD	
		Saluran Tertutup RT 1 RW 4 Kel Blitar			Pokok Pikiran DPRD	
		Saluran Tertutup Belakang Gereja Jl Tirtoyudo 1 Kel Blitar			Pokok Pikiran DPRD	
		Saluran Air, RT 01 dan 02 RW 01 Kel Blitar			Pokok Pikiran DPRD	
		Saluran Tertutup dan Gorong-gorong Kel Tanggung			Pokok Pikiran DPRD	
		Saluran Jalan Ciliman, RT 1 RW 4 Kel Tanggung			Pokok Pikiran DPRD	
		Saluran Jalan Sulawesi, RT 1 RW 1 Kel Klampok			Pokok Pikiran DPRD	
		Drainase Tertutup Jl Ploso, RT 2 RW 2 Kel Plosokerep			Pokok Pikiran DPRD	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Saluran Drainase Kel Kauman	Panjang saluran drainase yang direhabilitasi	250 m	Musrenbang	
		Saluran Air Tertutup Jalan Palem, Kel Rembang			l: 1,5 m, p: 119 m	Musrenbang
		Saluran Tertutup Jalan Turi Selatan, Kel Turi			p: 140 m, l/t: 40 cm	Pokok Pikiran DPRD
		Saluran Air Jalan Tidar, RW 4 Kel Kauman				Pokok Pikiran DPRD
		Drainase Jalan Sawunggaling, RT 4 RW 5 Kel Sentul			Pokok Pikiran DPRD	
		Pelebaran Saluran Jalan Bunaken, Kel Karangtengah			Pokok Pikiran DPRD	
		Perbaikan Gorong-gorong Jalan Sulawesi			Pokok Pikiran DPRD	
		Renovasi Saluran Jalan Suren, Kel Plosokerep				
	Pendalaman Gorong-gorong Jalan Nias	Pokok Pikiran DPRD				

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Tutup Saluran JI DI Panjaitan, Kel Ngadirejo	Jumlah sarana sistem drainase perkotaan yang diadakan		Pokok Pikiran DPRD
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Normalisasi Saluran Air Jalan Bengawan Solo Utara, RT 3 RW 5 Kel Tanjungsari	Panjang saluran drainase yang dioperasikan dan dipelihara		Pokok Pikiran DPRD
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
4	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Jalan dan Plat Duiker TPU JI Rambutan Kel Karang Sari	Panjang jalan dan utilitas yang dibangun		Musrenbang
		Pemb Jalan di Sekitaran Kali Krasak, Kel Pakunden			Pokok Pikiran DPRD
		Pemb Jalan di Utara Perumnas Pakunden			Pokok Pikiran DPRD
		Pemb Jalan di RT 2 RW 9 Kel Kepanjenkidul			Pokok Pikiran DPRD
		Pemb Jalan di RT 1 RW 1 Kel Kepanjenkidul			Pokok Pikiran DPRD
		Trotoar Jalan S.P. Harjono, Kel Bendogerit			Pokok Pikiran DPRD
		Pemb Jalan RT 1 RW 9 Kel Karangtengah			Pokok Pikiran DPRD
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Pengaspalan Jalan Kel Kauman	Panjang jalan dan utilitas yang direhabilitasi	6x210 m	Musrenbang
		Plat Duiker Perempatan Rondo Kuning, Kel Tlumpu			Pokok Pikiran DPRD
		Pengaspalan Hotmix Jalan RT 3 RW 2 Kel Pakunden			Pokok Pikiran DPRD
		Trotoar Jalan Bengawan Solo Kel Pakunden			Pokok Pikiran DPRD
		Pelebaran Jalan Kalicode, Kel Tanjungsari			Pokok Pikiran DPRD
		Pengaspalan Jalan Kali Lekso, Kel Pakunden			Pokok Pikiran DPRD
		Trotoar Sebelah Masjid Al Idris Jalan Mastrip			Pokok Pikiran DPRD
		Utilitas Jalan Ciliwung Kel Bendo			Pokok Pikiran DPRD
		Utilitas Jalan Cisanggiri Kel Tanggung			Pokok Pikiran DPRD
		Perbaikan Jalan dan Utilitas Jalan Cik Ditiro Kel Sentul			Pokok Pikiran DPRD
		Perbaikan Hotmix Jalan Aru, Kel Karangtengah			Pokok Pikiran DPRD
	Perbaikan Jalan di Jalan Kasan Sobari		Pokok Pikiran DPRD		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Jalan Pos Bagong ke Selatan, Kel Sentul	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala		Musrenbang
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Pelebaran Jembatan Penghubung RT 4 RW 10 dan RT 3 RW 8, Kel Bendogerit	Panjang jembatan yang direhabilitasi		Pokok Pikiran DPRD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, disebutkan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, dengan sasaran:
 - Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
 - Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;
 - Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
 - Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
 - Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
 - Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
 - Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
 - Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); dan
 - Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, dan menjamin pemerataan, dengan sasaran:
 - Pembangunan Wilayah Sumatera;
 - Pembangunan Wilayah Jawa-Bali;
 - Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
 - Pembangunan Wilayah Kalimantan;
 - Pembangunan Wilayah Sulawesi;
 - Pembangunan Wilayah Maluku; dan
 - Pembangunan Wilayah Papua.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:

- Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
 - Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
 - Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
 - Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;
 - Meningkatnya produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan sasaran:
- Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
 - Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
 - Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
 - Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
 - Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa; dan
 - Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan sasaran:
- Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
 - Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
 - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
 - Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan sasaran :
- Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim; dan
 - Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap *baseline*.

7. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik, dengan sasaran:

- Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal;
- Optimalnya kebijakan luar negeri;
- Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap;
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan
- Terjaganya stabilitas keamanan nasional.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2023, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, dukungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dalam pencapaian arah kebijakan nasional tahun 2023 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023, telah disebutkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan diprioritaskan pada mewujudkan proses pembangunan nasional yang berkualitas, baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan kualitas proses pembangunan tersebut, maka diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan lebih baik atau lebih berkualitas, dalam arti lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun, terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar-bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah.

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 dilaksanakan dengan fokus pada :

1. Menata pengelolaan jaringan irigasi dengan berpedoman pada masterplan irigasi;
2. Mendata dan menyusun kawasan prioritas permukiman yang belum tersedia instalasi pengolahan air limbah;

3. Menetapkan kawasan yang belum / tidak dapat dijangkau layanan PDAM dan membangun sumur bor;
4. Menetapkan masterplan penataan dan pengolahan drainase;
5. Penyediaan data infrastruktur yang akurat dan terkoneksi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran kinerja Renstra Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran dimaksud dijabarkan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan Rencana Kerja Dinas PU dan Penataan Ruang Tahun 2023

No.	Uraian	Indikator	Rumus Perhitungan	Target	
				Tahun 2022	Tahun 2023
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks infrastruktur pekerjaan umum	=50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya	86,36	86,77
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	= (Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	96,00	97
		Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	= (Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	92,00	94
3	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	Rata-rata penjumlahan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang setiap kawasan pada BWP I, II, III, IV	95,35	95,40

Tabel 3.2

Sasaran Rencana Kerja Dinas PU dan Penataan Ruang Tahun 2023

No.	Uraian	Indikator	Rumus Perhitungan	Target	
				Tahun 2022	Tahun 2023
1	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks infrastruktur Bina Marga	Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik	76,20	76,40
2	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks infrastruktur Sumber Daya Air	Rata-rata penjumlahan persentase saluran pengairan + persentase	97,00	97,75
3	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase gedung sesuai standar	= (Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah) x 100%	94,60	94,70
4	Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi	Persentase peran aktif jasa konstruksi	= (Jumlah jasa konstruksi yang aktif dibagi jumlah total jasa konstruksi Kota Blitar) x 100%	43,48	47,83
5	Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD	Persentase rumah Tangga yang memiliki akses SPALD	= (Jumlah Rumah tangga yang memiliki akses SPALD dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	9,07	9,45
6	Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses SPAM	= (Jumlah Rumah tangga yang memiliki akses SPAM dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	2,45	2,70
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	= Rata-rata penjumlahan Persentase perencanaan penataan ruang + Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	40,55	44,63

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Selain itu, perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023 mengacu pada langkah perbaikan LKJIP dengan fokus pada:

1. Penataan pengelolaan jaringan irigasi dengan berpedoman pada masterplan irigasi;
2. Pendataan dan penyusunan kawasan prioritas permukiman yang belum tersedia instalasi pengolahan air limbah;
3. Penetapan kawasan yang belum / tidak dapat dijangkau layanan PDAM dan membangun sumur bor;
4. Penetapan masterplan penataan dan pengolahan drainase;
5. Penyediaan data infrastruktur yang akurat dan terkoneksi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar telah menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				46,908,188,434				42,683,733,999
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82.7 Nilai	7,595,700,314			82.7 Nilai	6,923,365,000
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82.7 Nilai				82.7 Nilai	
1	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	27,076,148			100 %	40,950,000
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	2,076,148	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	ASN Dinas PUPR	10 Dokumen	7,350,000
1	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	ASN Dinas PUPR	1 Laporan	33,600,000
1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	5,929,871,652			100 %	4,955,250,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Orang/bulan	5,927,703,792	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas PUPR	36 Orang/bulan	4,950,000,000
1	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	2,167,860	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	ASN Dinas PUPR	5 Laporan	5,250,000
1	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	133,828,250			100 %	184,345,000
1	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	94,208,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas PUPR	3 Paket	90,000,000
1	3	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Orang	39,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	ASN Dinas PUPR	60 Orang	94,345,000
1	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	678,343,664			100 %	634,398,000
1	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	20,574,080	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	ASN Dinas PUPR	5 Paket	14,655,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	3	1	2.06	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Paket	264,755,308	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	ASN Dinas PUPR	11 Paket	102,205,000
1	3	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	2,966,868	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	ASN Dinas PUPR	12 Paket	5,000,000
1	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	40,965,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	ASN Dinas PUPR	4 Paket	83,097,000
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	41,977,408	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	ASN Dinas PUPR	2 Paket	16,065,000
1	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Dokumen	6,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	ASN Dinas PUPR	24 Dokumen	7,476,000
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Laporan	291,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	ASN Dinas PUPR	80 Laporan	385,900,000
1	3	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Dokumen	9,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas PUPR	100 Dokumen	20,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan		100 %	162,665,600			100 %	150,000,000
1	3	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 Unit	125,110,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas PUPR	32 Unit	100,000,000
1	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Unit	37,555,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas PUPR	8 Unit	50,000,000
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	294,003,000			100 %	363,946,000
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	61,953,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	ASN Dinas PUPR	4 Laporan	113,946,000
1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	104 Laporan	232,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas PUPR	104 Laporan	250,000,000
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	369,912,000			100 %	594,476,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	3	1	2.09	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 Unit	191,881,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	ASN Dinas PUPR	28 Unit	223,561,000
1	3	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39 Unit	18,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas PUPR	39 Unit	10,000,000
1	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	43,760,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	ASN Dinas PUPR	20 Unit	12,915,000
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	80,590,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	ASN Dinas PUPR	3 Unit	308,835,000
1	3	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	35,480,200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	ASN Dinas PUPR	3 Unit	39,165,000
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik		97 %	10,579,726,984			97 %	5,851,073,000
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jaringan Irigasi yang dilakukan Peningkatan dan Pemeliharaan		10.39 %	10,579,726,984			10.39 %	5,851,073,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Masyarakat di wilayah Kota Blitar	3 Dokumen	300,000,000
1	3	2	2.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.532 KM	2,282,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Masyarakat di wilayah Kota Blitar	0.532 KM	978,000,000
1	3	2	2.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.743 KM	4,964,702,120	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Masyarakat di wilayah Kota Blitar	1.743 KM	1,956,000,000
1	3	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.485 KM	3,032,624,864	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Masyarakat di wilayah Kota Blitar	3.485 KM	2,617,073,000
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam kondisi baik		88.9 %	307,528,900			88.9 %	1,678,798,000
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPAM yang terbangun		68.42 %	307,528,900			68.42 %	1,678,798,000
1	3	3	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	119,378,900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rumah Tangga Masyarakat	1 Dokumen	225,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	3	3	2.01	5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Liter/Detik	88,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rumah Tangga Masyarakat	15 Liter/Detik	853,798,000
1	3	3	2.01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rumah Tangga Masyarakat	2 Unit	150,000,000
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik		83 %	2,267,604,118			83 %	2,249,360,000
1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPALD yang terbangun		68.42 %	2,267,604,118			68.42 %	2,249,360,000
1	3	5	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	416,855,747	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rumah Tangga Masyarakat	1 Dokumen	129,360,000
1	3	5	2.01	5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Rumah Tangga	149,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rumah Tangga Masyarakat	10 Rumah Tangga	125,000,000
1	3	5	2.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Rumah Tangga	824,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rumah Tangga Masyarakat	25 Rumah Tangga	800,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	5	2.01	8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Kelompok	72,022,859	Dana Perimbangan	Rumah Tangga Masyarakat	10 Kelompok	80,000,000
1	3	5	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rumah Tangga Masyarakat	2 Unit	150,000,000
1	3	5	2.01	12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Rumah Tangga	502,780,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Rumah Tangga Masyarakat	50 Rumah Tangga	500,000,000
1	3	5	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Rumah Tangga	25,335,200	Dana Perimbangan	Rumah Tangga Masyarakat	36 Rumah Tangga	40,000,000
1	3	5	2.01	16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 M ³ /Hari	177,610,312	Dana Perimbangan	Rumah Tangga Masyarakat	20 M ³ /Hari	425,000,000
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik		98.5 %	8,631,822,300			98.5 %	4,287,428,000
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara		1.35 %	8,631,822,300			1.35 %	4,287,428,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	177,873,820	Dana Perimbangan	Saluran Drainase	1 Dokumen	175,000,000
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Meter	6,440,371,460	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Saluran Drainase	1500 Meter	3,089,608,000
1	3	6	2.01	7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 Meter	1,516,716,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Saluran Drainase	250 Meter	525,000,000
1	3	6	2.01	8	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	108,860,220	Dana Perimbangan	Saluran Drainase	1 Unit	150,000,000
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 Meter	388,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Saluran Drainase	400 Meter	347,820,000
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun		86.96 %	5,872,126,318			86.96 %	8,312,455,000
						Persentase gedung pemerintahan yang dibangun		87,5 %					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	3	8	2.01		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase penyelenggaraan bangunan gedung		100 %	5,872,126,318			100 %	8,312,455,000
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	255,813,868	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum	5 Dokumen	500,000,000
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	5,616,312,450	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum	2 Dokumen	4,200,000,000
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi baik		99.4 %	9,440,857,989			99.4 %	10,876,254,999
						Persentase jembatan dalam kondisi baik		99.7 %				99.7 %	
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi		5.09 %	9,440,857,989			5.09 %	10,876,254,999
						Persentase jembatan yang dibangun		50 %				50 %	
						Persentase jembatan yang dipelihara		6.12 %				6.12 %	
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jalan Kota	3 Dokumen	500,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 KM	5,286,421,316	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jalan Kota	1 KM	4,420,125,000
1	3	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 KM	1,441,616,674	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jalan Kota	2 KM	3,696,102,000
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 KM	750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jalan Kota	1 KM	740,109,000
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 M	443,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jalan Kota	20 M	443,880,000
1	3	10	2.01	17	Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 M	389,999,999	Pendapatan Bagi Hasil	Jalan Kota	4 M	389,999,999

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 M	628,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jalan Kota	3 M	628,940,000
1	3	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 M	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jalan Kota	400 M	57,099,000
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar		100 %	731,908,929			100 %	1,110,000,000
1	3	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat		77.02 %	387,216,184			77.02 %	600,000,000
1	3	11	2.01	6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	135,767,165	Dana Perimbangan	Pelaku Jasa Konstruksi	100 Orang	250,000,000
1	3	11	2.01	7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 Orang	251,449,019	Dana Perimbangan	Pelaku Jasa Konstruksi	250 Orang	350,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI		40 %	194,692,745			40 %	375,000,000
1	3	11	2.02	1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	7,453,145	Dana Perimbangan	Pelaku Jasa Konstruksi	1 Laporan	15,000,000
1	3	11	2.02	2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	67,950,000	Dana Perimbangan	Pelaku Jasa Konstruksi	2 Dokumen	200,000,000
1	3	11	2.02	8	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	73,129,600	Dana Perimbangan	Pelaku Jasa Konstruksi	3 Dokumen	75,000,000
1	3	11	2.02	9	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	46,160,000	Dana Perimbangan	Pelaku Jasa Konstruksi	4 Dokumen	85,000,000
1	3	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pengawasan jasa konstruksi		100 %	150,000,000			100 %	135,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	3	11	2.04	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	11	2.04	1	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	150,000,000	Dana Perimbangan	Pelaku Jasa Konstruksi	2 Dokumen	135,000,000
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketersediaan Dokumen Tata Ruang		81.58 %	1,480,912,582			81.58 %	1,395,000,000
1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RTRW kota		100 %	129,467,846			100 %	275,000,000
1	3	12	2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	129,467,846	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Wilayah Kota Blitar	2 Dokumen	275,000,000
1	3	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang		100 %	775,000,000			100 %	600,000,000
1	3	12	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	775,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Wilayah Kota Blitar	2 Dokumen	600,000,000
1	3	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tata Ruang		100 %	226,146,623			100 %	195,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	151,146,623	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Wilayah Kota Blitar	12 Dokumen	110,000,000	
1	3	12	2.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Wilayah Kota Blitar	1 Dokumen	85,000,000	
1	3	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketidaksesuaian tata ruang yang ditindaklanjuti		7.69 %	350,298,113			7.69 %	325,000,000	
1	3	12	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	350,298,113	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Wilayah Kota Blitar	5 Dokumen	325,000,000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								344,899,400	315,000,000
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti		100 %	15,750,000			100 %	50,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	10	4	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti		100 %	15,750,000			100 %	50,000,000
2	10	4	2.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Berita Acara	15,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Tanah Bersengketa	1 Berita Acara	50,000,000
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat		97 %	329,149,400			97 %	265,000,000
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen pertanahan yang tersusun sesuai regulasi		100 %	329,149,400			100 %	265,000,000
2	10	10	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Aset Tanah Pemerintah Daerah	1 Laporan	60,000,000
2	10	10	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	229,149,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Aset Tanah Pemerintah Daerah	1 Dokumen	205,000,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2023 sebagai penjabaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2023. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2021-2022.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2023 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan jika perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

Rencana Kerja Tahun 2023 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan *good governance* melalui perencanaan pembangunan yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat.